



Collaborative Governance pada Program Keluarga Berencana (KB) dalam Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Jagir Kota Surabaya

Septrian Jihan Aulia Fistabella

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

E-mail: 18041010160@student.upnjatim.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-02-07 Revised: 2025-03-23 Published: 2025-04-03 Keywords: <i>Collaborative Governance; KB Program; Population Growth; Surabaya City.</i>	Uncontrolled population growth is a major challenge in Indonesia, especially in Surabaya City. The Family Planning (KB) program is one of the main strategies in controlling the population growth rate with a collaborative governance approach. This research aims to analyze the implementation of collaborative governance in the family planning program in Jagir Village, Surabaya City, which involves various parties, including the government, the community, and the private sector. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. In collecting data, the author used interviews and observation methods. In data analysis, this research uses the Collaborative Governance framework according to Emerson et al. (2012) which consists of collaboration dynamics, collaboration actions, and impact and adaptation. Meanwhile, the data analysis technique used purposive and snowball sampling techniques. The results showed that inter-stakeholder collaboration plays an important role in increasing the effectiveness of the family planning program, although there are still challenges in providing contraceptive services and education. Therefore, increased synergy between parties is needed to strengthen the family planning program and improve community welfare.

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-02-07 Direvisi: 2025-03-23 Dipublikasi: 2025-04-03 Kata kunci: <i>Collaborative Governance; Program KB; Pertumbuhan Penduduk; Kota Surabaya.</i>	Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menjadi tantangan besar di Indonesia, khususnya di Kota Surabaya. Program Keluarga Berencana (KB) menjadi salah satu strategi utama dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan pendekatan collaborative governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi collaborative governance dalam program KB di Kelurahan Jagir, Kota Surabaya, yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara dan observasi. Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan kerangka kerja Collaborative Governance menurut Emerson et al., (2012) yang terdiri atas dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, dan dampak dan adaptasi. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan teknik sampel purposive dan snowball. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar-stakeholder berperan penting dalam meningkatkan efektivitas program KB, meskipun masih terdapat tantangan dalam penyediaan layanan dan edukasi kontrasepsi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antar-pihak guna memperkuat program KB dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Negara adalah organisasi tertinggi di wilayah tertentu yang memiliki sekelompok masyarakat yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau mengendalikan masalah secara kolektif atas nama masyarakat. Negara harus memiliki pemerintahan yang berdaulat dengan sistem hukum yang sama yang diakui oleh negara lain. Menurut Azizah et al., (2023), untuk mengurangi angka kemiskinan di berbagai negara, berbagai kebijakan seperti peningkatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, jembatan, pasar dan sarana lainnya telah digunakan. Yang paling penting adalah pembangunan sumber daya

manusia (SDM) melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan.

Namun demikian, masalah utama yang dihadapi semua negara, baik negara maju maupun yang berkembang hampir sama dan biasanya berasal dari masalah jumlah penduduk. Jumlah kelahiran terus meningkat setiap hari karena kesadaran masyarakat yang rendah tentang reproduksi. Akibatnya, angka kematian ibu dan bayi terus meningkat. Penurunan populasi global adalah masalah utama bagi negara-negara di seluruh dunia pada abad ini. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti air dan udara akan berdampak pada perubahan iklim global (Kusuma et al., 2020).

Program KB merupakan program yang didesain sebagai program pemberdayaan masyarakat yang bersifat kolaboratif karena selain bisa mengentaskan kemiskinan, mendekatkan pembangunan kepada masyarakat juga melibatkan semua sektor pembangunan (Yunas & Nailufar, 2019). Hingga saat ini, dalam proses implementasinya program KB melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah dari semua level (pemerintah pusat, pemerintah daerah, kecamatan, dan kelurahan), masyarakat sipil beserta organisasi yang ada serta sektor swasta.

Namun demikian, berdasarkan Rencana Strategis DP3A-P2KB Kota Surabaya Tahun 2021-2026 masih ditemukan beragam permasalahan dalam implementasi KB di Kota Surabaya mulai dari masih adanya pasangan usia subur yang belum mengikuti KB, masih jauh jarak fasilitas kesehatan pelayanan KB MKJP, masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menentukan pemilihan alat kontrasepsi MKJP, masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang terampil dalam pelayanan KB MKJP, dan minimnya pengetahuan masyarakat dalam penerapan 8 (delapan) fungsi keluarga (DP3A-P2KB Kota Surabaya, 2022).

Didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Islami et al., (2021), bahwa secara umum program KB ini cenderung sudah bisa menekan laju pertumbuhan penduduk, namun pertumbuhan jumlah penduduk relatif cepat tinggi yang disebabkan kurangnya penyuluhan program KB, dari situ awalnya tidak efektifnya dalam suatu kebijakan. Belum adanya regulasi berupa Peraturan Walikota yang menjadi payung dari program KB itu sendiri menjadi catatan kritis agar dapat diimplementasikan secara cepat dan merata. Selain itu, diperlukan pembentukan sebuah forum yang dapat dijadikan sebagai wadah sinergitas antar stakeholder yang ada seperti OPD, Kecamatan, Kelurahan, ICSO, sektor swasta hingga masyarakat agar memudahkan koordinasi dan fasilitasi terhadap program yang telah dibuat. Sehingga terjadinya peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan program KB yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran.

Masalah-masalah tersebut tidak menggambarkan collaborative governance menurut Emerson et al., (2012) pada aspek dampak dan adaptasi dalam kolaborasi. Menurut Emerson et al., (2012) efektivitas collaborative governance bergantung pada dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, dan dampak dan adaptasi. Dampak yang diharapkan adalah "small-wins" yaitu hasil-

hasil positif yang terus berlangsung dan memberikan semangat para aktor. Sedangkan adaptasi yang dimaksud adalah bagaimana kolaborasi menyikapi umpan balik dari masing-masing aktor yang ada.. Dalam konteks ini menurut Kirana & Artisa (2020), bahwa collaborative governance merupakan suatu model dalam membangun suatu daerah, pemerintah tidak dapat dengan mandiri mengelola daerahnya, sehingga peran dan fungsi pemerintah tidak lagi menjadi dominan, dibutuhkan peran dan fungsi pemangku kepentingan yang lain untuk menyelesaikan permasalahan maupun mengakomodir kebutuhan masyarakat. BKKBN juga mendorong adanya paradigma baru tentang KB. Paradigma baru tersebut adalah tidak hanya berpikir tentang jumlah anak namun juga kualitas anak yang dilahirkan dengan mendorong aspek kolaboratif dalam penerapannya (Bkkbn.go.id, 2022).

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kerangka kerja integratif untuk collaborative governance yang dikemukakan oleh Emerson et al., (2012) dalam Astuti et al., (2020). Proses kolaborasi tersebut terdiri dari: (1) dinamika kolaborasi, (2) tindakan kolaborasi, serta (3) dampak dan adaptasi. Studi collaborative governance yang digunakan dalam penelitian ini, menggambarkan hubungan kerjasama yang dilakukan oleh berbagai pihak. Diharapkan dengan konsep tersebut pihak yang berkolaborasi mampu memahami tugas serta fungsinya masing-masing sehingga terjalin koordinasi dalam mencapai tujuan dari kolaborasi tersebut (Septiani et al., 2021).

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, bahwasannya terdapat keterlibatan pihak lain dalam program KB, dalam hal ini merupakan praktik dari collaborative governance. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam dengan pendekatan collaborative governance yang dilakukan oleh DP3A-P2KB Kotal Surabaya dengan stakeholder terkait sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Atas dasar tersebut, mendorong peneliti melakukan penelitian yang berjudul "Collaborative Governance Pada Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Jagir Kota Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis collaborative governance pada program KB dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kelurahan Jagir Kota Surabaya.

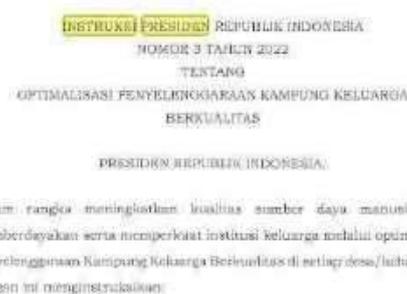
II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan DP3A-P2KB Kota Surabaya, tenaga kesehatan di RS William Booth, serta masyarakat Kelurahan Jagir. Observasi dilakukan terhadap kegiatan penyuluhan dan pelayanan KB. Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan kerangka kerja Collaborative Governance menurut Emerson et al., (2012) yang terdiri atas dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, dan dampak dan adaptasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles & Huberman (1994) yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan teknik sampel purposive dan snowball.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Kolaborasi Penggerakan Prinsip Bersama

Terkait penggerakan prinsip bersama melalui pengungkapan proses mengungkap bahwa terdapat kesamaan kepentingan dan nilai yang dianut oleh para stakeholder terkait seperti pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Pihak pemerintah dalam praktik collaborative governance pada program KB dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kelurahan Jagir Kota Surabaya didasarkan adanya Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ibu Dra. Musatun Asykur selaku Bidang Pengendalian Penduduk, KB dan Keluarga Sejahtera DP3A-P2KB Kota Surabaya bahwa: "Penggerakan prinsip bersamanya ya itu mba diawali dengan adanya regulasi dari Inpres Nomor 3 Tahun 2023 akhirnya mendorong OPD buat bikin KKB di setiap kelurahan, salah satunya juga ya di kelurahan Jagir itu yang sudah bagus sekarang." (Wawancara pada tanggal 10 November 2024).



Gambar 1. Inpres Nomor 3 Tahun 2022

Pernyataan tersebut juga selaras dengan apa yang disampaikan Ibu Laksmi Suproborini, ST., M.MT selaku Kepala Kelurahan Jagir sebagai berikut:

"Untuk penggerakan prinsip bersama ini didasarkan pada aturan dan regulasi yang ada dan arahan dari Pemkot bahwa setiap kelurahan itu diharuskan untuk memaksimalkan serta juga memberdayakan warga dalam pelaksanaan program KB. Jadi kami berpedoman pada hal itu." (Wawancara pada tanggal 11 November 2024)

a) Motivasi Bersama

Terdapat motivasi bersama diantara stakeholder terkait melalui rasa percaya, pemahaman, legitimasi internal, dan komitmen yang telah terbangun pada program KB dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kelurahan Jagir Kota Surabaya. Motivasi ini telah terbangun sedari awal akibat riwayat kerjasama yang baik antara OPD dengan pihak swasta yaitu RS William Booth, dan masyarakat Kelurahan Jagir melalui proses komunikasi dan koordinasi yang fleksibel, lancar, cepat, dan terkoordinir. Seperti yang diungkapkan Ibu Kirana Diah, A.Md Kes. selaku staf pelayanan KB di Rumah Sakit William Booth Surabaya bahwa:

"Proses koordinasi dan komunikasi yang berjalan dengan pihak DP3A-P2KB maupun Dinkes maupun Pemkot juga bagus ya Mbak, kita percaya bahwa kita bisa samasama untuk saling membantu, komitmen mewujudkan keluarga sehat melalui KB ini. Jadi kita termotivasi untuk lebih bersinergi dalam program KB ini." (Wawancara pada tanggal 11 November 2024).



Gambar 2. Kesepakatan Bersama antara DP3A-P2KB dengan RS William Booth Surabaya

Sumber: Dokumen DP3A-P2KB Kota Surabaya (2023)

b) Kapasitas Melakukan Tindakan Bersama

Kolaborasi pada program KBI dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kelurahan Jagir Kota Surabaya memerlukan adanya kapasitas memadai dari para aktor melalui berbagai elemen untuk menghasilkan tindakan yang efektif.

Prosedur dan kesepakatan bersama secara formal didasari pada berbagai regulasi dan ketetapan yang berkenaan dengan program KB untuk digunakan sebagai pedoman dan aturan dasar dalam proses kolaborasi pengendalian laju pertumbuhan penduduk Kota Surabaya diantaranya seperti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Kedua regulasi tersebut merupakan panduan yang memuat program dan kegiatan penyelenggaraan KKB dan/atau KB. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Dra. Musatun Asykur selaku Bidang Pengendalian Penduduk, KB dan Keluarga Sejahtera DP3A- P2KB Kota Surabaya bahwa proses kolaborasi didasari regulasi dan ketetapan optimalisasi KKB:

“Terkait regulasi dasarnya itu merujuk pada penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas, jadi KB ini sama aja penyebutannya dengan KKB, program utamanya ya KB itu. Nah berkaitan dengan program KB ini kita mengacu pada Inpres itu nomor 3 Tahun 2022 sama juga ada regulasi dari BKKBN turunnya Inpres itu. Bisa dicek di internet itu mengenai optimalisasi KKB.” (Wawancara pada tanggal 10 November 2024)

Berdasarkan informasi dan temuan di lapangan dapat dipahami bahwa dinamika kolaborasi yang terbagi menjadi pergerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas melakukan tindakan bersama ikut memengaruhi dan berperan vital dalam proses kolaborasi pada program KB dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kelurahan Jagir yang dilaksanakan oleh stakeholder terkait yaitu Pemerintah Kota Surabaya, pihak swasta yaitu RS William Booth, dan unsur masyarakat yang diwakili oleh Tim Pokja KKB “Mandiri Berkarya”.

2. Tindakan Kolaborasi

Selama proses kolaborasi pada program KB dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kelurahan Jagir Kota Surabaya, tindakan kolaborasi dari para aktor stakeholder yang terlibat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tindakan yang bisa dilakukan oleh stakeholder yang terlibat dan tindakan yang khusus atau secara spesifik hanya bisa dilakukan oleh satu stakeholder sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.

Berbagai tindakan yang dilakukan oleh semua stakeholder selama proses kolaborasi berlangsung ialah Pertama, program KB gratis di Kelurahan Jagir. Seperti yang diutarakan Ibu Dra. Musatun Asykur selaku Bidang Pengendalian Penduduk, KB dan Keluarga Sejahtera DP3A-P2KB Kota Surabaya bahwa langkah awal dalam tindakan kolaborasi ini adalah bisa memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan reproduksi, yang sebelumnya sulit dijangkau oleh mereka serta edukasi tentang kesehatan reproduksi pun gencar dilakukan agar masyarakat memahami manfaat dari program KB: “Untuk menarik perhatian warga agar mau ikut program KB ya kita berikan layanan gratis dulu, ini sangat penting karena pelayanan program KB di Surabaya ini bisa dikatakan menjadi anget segar ya khususnya warga yang kurang mampu. Jadi program ini bisa memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan reproduksi, yang sebelumnya sulit dijangkau oleh mereka sekaligus juga memberikan edukasi manfaat program KB ini apa.” (Wawancara pada tanggal 10 November 2024).



Gambar 3. Kegiatan Program KB Gratis di Kelurahan Jagir

Sumber: Dokumentasi Tim Pokja KKB “Mandiri Berkarya”



Gambar 4. Materi Edukasi Program KB Gratis
Sumber: Dokumentasi Tim Pokja KKB "Mandiri Berkarya"

Kedua, dalam upaya mendukung kesehatan reproduksi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya KB, DP3A- P2KB Kota Surabaya menggelar bakti sosial pelayanan KB pada 22 Oktober 2024 di UPTD Puskesmas Jagir dengan diikuti 80 peserta dari Kecamatan Wonokromo. Hal ini disampaikan oleh Ibu Dra. Musatun Asykur selaku Bidang Pengendalian Penduduk, KB dan Keluarga Sejahtera DP3A- P2KB Kota Surabaya:

"Kemudian program kedua yaitu ada Bakti Sosial Pelayanan KB. Sebetulnya program ini hampir serupa dengan yang kami adakan program KB gratis tahun lalu. Karena program ini juga gratis juga, yang membedakan adalah di setiap masing- masing wilayah Kecamatan itu fokus pelayanan KB berbeda-beda, sesuai kondisi setiap Kecamatan, ada yang KB IUD saja, ada yang hanya KB Implant, ada juga yang dua- duanya juga. Untuk kegiatannya sendiri di Jagir itu kita lakukan beberapa waktu lalu tanggal 22 Oktober di Puskesmas Jagir, dihadiri oleh 80 peserta." (Wawancara pada tanggal 10 November 2024).

Ibu Kirana Diah, A.Md Kes. selaku staf pelayanan KB di Rumah Sakit William Booth Surabaya menambahkan terkait keterlibatan dalam bakti sosial pelayanan KB pada 22 Oktober 2024 di UPTD Puskesmas Jagir bahwa:

"Keterlibatan kami RS William Booth Surabaya hanya sebagai fasilitasi dan support SDM serta memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang diberikan." (Wawancara pada tanggal 11 November 2024).



Gambar 5. Bakti Sosial Pelayanan KB IUD Implant

Sumber: Dokumentasi Tim Pokja KKB "Mandiri Berkarya"

Selanjutnya adalah tindakan yang khusus atau secara spesifik hanya bisa dilakukan oleh beberapa stakeholder sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Dalam hal ini, Tim Pokja KKB "Mandiri Berkarya" Kelurahan Jagir selama tahun 2024 tepatnya pada 17 Januari 2024 dan 16 Juli 2024 menyelenggarakan kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada ibu-ibu balita tentang pentingnya gizi seimbang bagi balita untuk mencegah stunting. Kegiatan ini terlaksana dengan dukungan dari DP3A-P2KB Kota Surabaya, RS William Booth Surabaya dan Kelurahan Jagir, serta Masyarakat sebagai sasaran kegiatan. Pernyataan ini diungkapkan oleh Ibu Noor Sinun selaku Ketua Tim Pokja KKB "Mandiri Berkarya" Kelurahan Jagir:

"Kalau kegiatan program dari Kelurahan Jagir itu sendiri ada namanya kami bikin kegiatan DASHAT atau Dapur Sehat Atasi Stunting. Sifat kegiatannya lebih ke kami memberdayakan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting yang memiliki calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, baduta/balita stunting terutama dari keluarga kurang mampu. Dengan melalui pemanfaatan sumberdaya lokal yang dapat dipadukan kontribusi dari mitra lainnya, yang dihadiri oleh Kader Surabaya Hebat, Nakes Poli Gizi dari Puskesmas Jagir dan Nakes Pelayanan KB dari RS William Booth Surabaya dan mahasiswa MSIB." (Wawancara pada tanggal 12 November 2024)

Adapun peran dari pihak swasta diungkapkan Ibu Kirana Diah, A.Md Kes. selaku staf pelayanan KB di Rumah Sakit William Booth Surabaya yakni menyediakan SDM Nakes Poli Gizi Pelayanan KB:

"Untuk kegiatan DASHAT yang diadakan Pokja Mandiri Berkarya di Jagir itu kami

membantu memberikan penyediaan Nakes Poli Gizi bersama dengan Puskesmas Jagir Mbak. Selain itu, kami juga membantu melakukan bimbingan kepada calon pengantin, karena kita dilibatkan juga sebagai tim pendamping keluarga (TPK).” (Wawancara pada tanggal 11 November 2024).



Gambar 6. Kegiatan DASHAT

Sumber: Dokumentasi Tim Pokja KKB “Mandiri Berkarya”

Adapun setelah dilakukan kegiatan DASHAT pada bulan Januari 2024, Tim Pokja KKB “Mandiri Berkarya” Kelurahan Jagir bersama dengan DP3A-P2KB Kota Surabaya dan RS William Booth Surabaya melakukan bimbingan kepada calon pengantin (catin). Hal ini diungkapkan oleh Ibu Noor Sinun selaku Ketua Tim Pokja KKB “Mandiri Berkarya” Kelurahan Jagir:

“Bimbingannya ada juga, jadi prosesnya itu secara berkelanjutan. Setelah ada kegiatan DASHAT periode pertama bulan Januari, kemudian bulan selanjutnya setiap 1 bulan sekali kami melakukan bimbingan kepada calon pengantin Mbak, tepatnya Februari, Maret, April, Mei. Bimbingannya 4 Kali. Nah bimbingannya itu dibantu oleh Dinas sama juga RS William Booth Surabaya.” (Wawancara pada tanggal 12 November 2024).

Ibu Kirana Diah, A.Md Kes. selaku staf pelayanan KB di Rumah Sakit William Booth Surabaya menambahkan bahwa bimbingan catin oleh TPK dalam KB dalam rangka edukasi mengenai persiapan fisik dan mental sebelum menikah. Program ini juga diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya persiapan matang sebelum menikah:

“Betul Mbak, jadi bimbingan ini merupakan edukasi kepada catin agar mereka sadar terkait pentingnya persiapan matang sebelum menikah baik itu secara fisik maupun mental

ya.” (Wawancara pada tanggal 11 November 2024).



Gambar 7. Bimbingan Catin Bulan Februari s.d Mei

Sumber: Dokumentasi Tim Pokja KKB “Mandiri Berkarya”

Berdasarkan informasi dan temuan di lapangan dapat dipahami bahwa tindakan kolaborasi oleh para stakeholder terkait dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kelurahan Jagir Kota Surabaya diwujudkan melalui program KB gratis, bakti sosial pelayanan KB IUD Implan, kegiatan DASHAT hingga bimbingan catin.

3. Dampak dan Adaptasi

Dampak yang ditimbulkan selama proses kolaborasi program KB dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kelurahan Jagir Kota Surabaya terbagi menjadi 2 (dua) yakni dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek dapat dilihat melalui respon masyarakat terhadap program KB, dan tingkat kesehatan masyarakat Kelurahan Jagir setelah dilakukan berbagai tindakan kolaborasi dalam program KB.

Adapun dampak adanya kolaborasi program KB gratis, bakti sosial pelayanan KB IUD Implan, dan kegiatan DASHAT hingga bimbingan catin mendapatkan respon positif dari masyarakat Kelurahan Jagir. Hal ini disampaikan oleh Ibu Laksmi Suproborini, ST., M.MT selaku Kepala Kelurahan Jagir yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah banyak perubahan progress positif ya mulai dari kesehatan masyarakat sudah terlihat lebih baik. Apalagi juga sudah banyak kegiatan kolaborasi yang kami lakukan dalam kegiatan KB ini.” (Wawancara pada tanggal 12 November 2024)

Selaras dengan pendapat di atas, Ibu Kirana Diah, A.Md Kes. selaku staf pelayanan KB di Rumah Sakit William Booth Surabaya juga mengungkapkan bahwa:

“Setelah mengikuti kegiatan ini peserta (PUS) menjadi terbantu karena mendapatkan pelayanan gratis pemasangan alat kontrasepsi berupa IUD dan Implan. Mungkin yang menjadi hal membuat tertarik karena Pokja disini juga sangat aktif ya ditambah juga kegiatan ini gratis jadi semuanya saling bekerjasama untuk menciptakan keluarga yang lebih sehat.” (Wawancara pada tanggal 11 November 2024)

Selanjutnya, dampak jangka panjang dalam kolaborasi program KB dapat dilihat melalui terwujudnya pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kota Surabaya. Pernyataan ini disampaikan oleh Ibu Dra. Musatun Asykur selaku Bidang Pengendalian Penduduk, KB dan Keluarga Sejahtera DP3A-P2KB Kota Surabaya:

“Untuk dampak jangka panjang itu bisa dilihat melalui bagaimana pemerintah bisa secara komprehensif bisa mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Nah DP3A- P2KB punya program khusus dalam melakukan pengendalian penduduk di Kota Surabaya, yakni dengan berfokus pada Pasangan Usia Subur (PUS) dengan ikut ber- KB.” (Wawancara pada tanggal 10 November 2024).

Berdasarkan informasi dan temuan di lapangan dapat dipahami bahwa terdapat dampak jangka pendek dan jangka panjang yang berimplikasi pada perubahan positif yang ditimbulkan selama proses kolaborasi program KB dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kelurahan Jagir. Meskipun masih terdapat kendala dan tantangan terkait mitos seputar penggunaan alokan dan mitos kultur yang berkembang di masyarakat bahwa banyak anak membawa keberuntungan dan banyak anak laki-laki mengangkat derajat keluarga, akan tetapi hal tersebut dapat teratasi seiring dengan adanya proses adaptasi yang dilakukan melalui berbagai upaya guna menyikapi umpan balik dari masing-masing stakeholder.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu collaborative governance pada program KB dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kelurahan Jagir Kota Surabaya telah terlaksana dengan baik dan telah sesuai dengan model kerangka kerja integratif collaborative governance dari Emerson, Nabatchi, dan Balogh, walaupun terdapat kendala, namun kendala tersebut tidak mengganggu proses kolaborasi secara keseluruhan dan dapat diatasi dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah diulas sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran dan masukan yang membangun yaitu Collaborative governance pada program KB perlu ditingkatkan, diharapkan semakin banyak pihak swasta terutama yang berfokus pada inisiatif pembangunan keluarga yang berkualitas dan memiliki kesadaran dan pemahaman akan pentingnya KB, serta masyarakat dan Pemerintah Kelurahan Jagir khususnya Tim Pokja KKB “Mandiri Berkarya” perlu berperan aktif dan mendorong masyarakat lainnya untuk turut berpartisipasi pada program KB terlebih masih ditemukan masyarakat PUS ketidaksertaan program KB.

DAFTAR RUJUKAN

- Agasinta, I. I., Subowo, A., & Santoso, R. S. (2024). Analisis Collaborative Governance Dalam Pengembangan Objek Wisata Museum Kota Lama Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 13(2), 1-14. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i2.43573>
- Aini, A. N., Nazilah, L., Dhewi, A., Sari, N., Adila, R., & Ichbatullah, N. (2023). Penggunaan Jenis Program Keluarga Berencana (KB) Masyarakat Desa Kedungsumur, Krembung, Sidoarjo. *Jurnal Pengabdian ...*, 4(4), 3057-3062. <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/1641>
- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi* (B. A. Saebani, Ed.; 1st ed.). Pustaka Setia.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.

- Anggraeni, D. E., Wahyuni, S., & Arieffiani, D. (2022). Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya. *Public Sphere Review: Journal of Public Administration*, 2(4), 15–20. <https://doi.org/10.30649/psr.v1i1.26>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2021). *Panduan Pelaksanaan Pendampingan Keluarga dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Tingkat Desa/Kelurahan*.
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2023). *Kota Surabaya Dalam Angka 2023*. <https://surabayakota.bps.go.id>
- BKKBN. (2021). *Modul Pelatihan Bagi Pelatih (Pelayanan Kontrasepsi Bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan) (Issue Pelayanan KB)*.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (IV; A. Faw, Ed.). Pustaka Pelajar.
- DP3A-P2KB Kota Surabaya. (2022). *Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya Tahun 2021-2026*.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Islami, O. F. F., Irianto, H., & Ratnawati, S. (2021). Sosialisasi Program Keluarga Berencana Untuk Meningkatkan Sawunggaling Kota Surabaya. *Jurnal Intelektual Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 7(1), 79–83. <https://doi.org/10.34369/intelektualjournal.v8i01.237>
- Kusuma, R. D., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2020). Analisis Upaya Kota Surabaya Untuk Mewujudkan Kota Hijau (Green City). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 13–27. <https://doi.org/10.25157/dinamika.v7i1.3173>
- Yunas, N. S., & Nailufar, F. D. (2019). Collaborative Governance Melalui Program KB di Kabupaten Jombang. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 162–173. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.21814>